

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, Bahrullah. 2013. Akuntansi Pemerintah, Cetakan I. Jakarta: CV. Bumi Metro Jaya.
- Asrullani, Muhamad. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Pemerintah Daerah. Jakarta: Biro Humas dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Boediono. 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE
- Doyle, Jeffrey, et.al. (2007). Determinants of Weakness in Internal Control Over Financial Reporting. *Journal of Accounting and Economics*, Utah State University, University of Washington, dan New York University.
- Fauza, Nailatul. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *JOM FEKON*, Vol.2, No.2.
- Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Cetakan 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gillan, Stuart L. (2006). Recent Development in Corporate Governance: An Overview. *Journal of Corporate Finance*, Vol. 12 pp. 381-402
- Gujarati, Damodar N. 2006. Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid I. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol.2 No.1 Hal: 53-64.
- \_\_\_\_\_. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol.2, No.2.
- Handayani, Desi. (2012). Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol.5 Hal 12-16

- Hartadi, Bambang. 2004. Sistem Pengendalian Intern (Dalam Hubungannya Dengan Manajemen dan Audit). Edisi ke-3. Yogyakarta: BPFE.
- Hartono, Rudi. (2014). Pengaruh Pertumbuhan, Size, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Skripsi Sarjana. FE UNNES. Semarang.
- \_\_\_\_\_. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram, Lombok.
- Jensen Michael C. Dan William H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol.3 No.4 pp 305-360.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah.
- Kristanto, Septian Bayu. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, Vol.9 No.1 Hal: 1-17
- \_\_\_\_\_. (2010). Kelemahan Pengendalian Internal dilihat dari Kemampuan dan Pemekaran Pemerintah Daerah. *ResearchGate Conference Paper*.
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- \_\_\_\_\_. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Martani, Dwi dan Fazri Zaelani. (2011). Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XIV, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Metode Kuantitatif: Teori Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Pertama. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Nirmala, Swastia dan Daljono. (2013). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Laju Pertumbuhan, dan Kompleksitas Transaksi terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.2 No.1 Hal: 1-9.
- Nurwati, Ika dan Rina Trisnawati. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Syariah Paper Accounting*. FEB UMS. Hal: 363-373

- Petrovits, Christine, et.al. (2009). The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations. *Accounting Review*. Vol.86 Issue 1, p 325-357
- Puspitasari, Titus. (2013). Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Putri, Novi Kumala dan Amir Mahmud. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Ukuran, dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemda. *Accounting Analysis Journal*, Vol.4 No.2
- Putro, Prima Utama Wardoyo. (2013). Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening. Skripsi Sarjana. FE UNNES. Semarang.
- Rachmawati, Dian Eka dan Nur Handayani. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.5, No.4.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2002. Pengantar Ilmu Ekonomi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Edisi ke-3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rosyada, Ayu Amrina. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4 No.1 Hal 102-114
- Ruslina Elli. (2012). Makna Pasal 33 UUD 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1
- Santoso, Singgih. 2001. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. PT ELEK Media Komputindo. Jakarta
- Saputro, Eko Adi dan Amir Mahmud. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, Vol.4 No.3
- Storm, K. (2000). Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies. *European Journal of Politic Research* 37: 261-289

- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suhardjanto dan Yulianingtyas. (2011). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Sebelas Maret.
- Sukirno, Sardono. (1996). *Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi ke-2*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Tarigan, Robinson, 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warren, Carl S. 2008. *Pengantar Akuntansi I*. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.
- Winarno, W. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan Eviews*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Yani, Ahmad. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber dari Internet:

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II tahun 2012-2016 (online). <http://www.bpk.go.id>. (Diakses pada 15 Maret 2017).
- Badan Pusat Statistika. (2002). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Data Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015* (online). <http://www.bps.go.id>. (Diakses tanggal 13 Maret 2017).
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Temuan BPK dalam LKPD TA 2014 Perlu Perhatian*. <http://dprd.jabarprov.go.id/>. (Diakses pada tanggal 09 Maret 2017).
- Inspektorat Kabupaten Purworejo. *Pengaruh SPIP terhadap Opini BPK*. <http://www.inspektorat.purworejokab.go.id/>. (Diakses pada tanggal 10 Maret 2017).
- Kurniawan, Deny. *Forum Statistika*. <http://ineddeni.wordpress.com/>. (Diakses pada tanggal 07 Juli 2017).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2007 tentang *Bagan Akuntansi Standar (BAS)*. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/>. (Diakses pada 7 Mei 2017).

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2011 tentang Klasifikasi Anggaran. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/>. (Diakses pada 7 Mei 2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. <http://www.bpkp.go.id/>. (Diakses pada 9 Mei 2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Belanja Modal. <http://www.djpk.depkeu.go.id/>. (Diakses pada 6 Mei 2017).
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis 02 tentang Neraca Awal Pemerintah Daerah. <http://www.ksap.org/>. (Diakses 10 Maret 2017).
- Provinsi Banten. Banten Terus Benahi Korupsi. <http://bantenprov.go.id/>. (Diakses pada tanggal 09 Maret 2017).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Pengaturan Pajak Daerah. <http://laman.dgip.go.id/>. (Diakses 11 Maret 2017).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/>. (Diakses pada 7 Mei 2017).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. <http://www.djpk.depkeu.go.id/>. (Diakses pada 6 Mei 2017).
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 5 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. <http://www/bpk.go.id/>. (Diakses pada tanggal 21 April 2017).
- Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 319. <http://natawidnyana.files.wordpress.com/>. (Diakses pada 1 Mei 2017).